



Belum diundangkan/diketahui:

1. UU No. 11 Tahun 2018
2. Perpres No. 6, 8, 57, 58, 73 dan 128 Tahun 2018

BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

**PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
(PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN)
TAHUN 2018**

TABEL 1
UNDANG-UNDANG

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
1.	1 Tahun 2018	Kepalangmerahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 	Merupakan UU baru yang dilatarbelakangi oleh pengaturan mengenai Kepalangmerahan yang belum diatur dalam suatu Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan 2) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 	KOMISI IX

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
					Undang- Undang ini.	
2.	2 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945	Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD karena sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat.		KOMISI II

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
3.	3 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government Of the Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cooperation In The Field Of Defence</i>)	Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang;	Baru	Kumulatif Terbuka	KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
4.	4 Tahun 2018	Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945.	Baru	Kumulatif Terbuka	KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
5.	5 Tahun 2018	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945.	Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang	Pada saat Undang-Undang ini Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.	KOMISI I (PANSUS)

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
6.	6 Tahun 2018	Kekarantinaan Kesehatan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara	1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.	KOMISI IV (BADAN LEGISLASI)

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
7.	7 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defense</i>)		Baru	Kumulatif Terbuka	KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
8.	8 Tahun 2018	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017			Kumulatif Terbuka	BADAN ANGGARAN

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
9.	9 Tahun 2018	Penerimaan Negara Bukan Pajak		Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	<p>1) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
10.	10 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia)			Kumulatif Terbuka	KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
11.						

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
12.	12 Tahun 2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019			Kumulatif Terbuka	BADAN ANGGARAN

TABEL 2
PERATURAN PEMERINTAH

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
1.	1 Tahun 2018	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		KOMISI II
2.	2 Tahun 2018	Standar Pelayanan Minimal	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama tanggal 1 Januari 2019. 2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2019.	KOMISI II
3.	3 Tahun 2018	Jenis dan Tarif Atas	Pasal 2 ayat (2) dan	Mencabut dan	Merupakan pengaturan	KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan	(3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan	kembali penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan,	
4.	4 Tahun 2018	Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Baru	Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.	KOMISI V
5.	5 Tahun 2018	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pasal 19, Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Baru		KOMISI VIII
6.	6 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)	Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum		KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		PT Pertamina		(Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).		
7.	7 Tahun 2018	Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	<p>1) Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>2) Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p>	<p>1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan</p>	<p>1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini</p> <p>2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p>	KOMISI III

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
				dengan perubahan Undang-Undang dimaksud.		
8.	8 Tahun 2018	Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Perubahan	1. Perubahan Pertama: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 2. Perubahan Kedua: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 3. Perubahan Ketiga: Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 4. Perubahan Keempat: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017	KOMISI VII
9.	9 Tahun 2018	Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	1) Pasal 5, Pasal 33, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Baru	1) Semua peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 2) Peraturan perundang-undangan mengenai	KOMISI IV dan KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
					pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang telah ada harus disesuaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	
10.	10 Tahun 2018	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.	KOMISI IX (Belum ditetapkan sebagai mitra kerja komisi-komisi DPR RI)
11.	11 Tahun 2018	Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh	Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	Baru	Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Instansi Pemerintah yang telah mengoperasikan Stasiun Bumi, wajib melaporkan dan menyerahkan duplikat	KOMISI V

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
					data kepada Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku	
12.	12 Tahun 2018	Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota	Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Baru		KOMISI II
13.	13 Tahun 2018	Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofistka	Pasai 72 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 79 Jndang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Baru		KOMISI V
14.	14 Tahun 2018	Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian	Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kaidi diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah		KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
				Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian		
15.	15 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara		Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PI Perusahaan Listrik Negara	KOMISI VI
16.	16 Tahun 2018	Satuan Polisi Pamong Praja	Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	1) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini 2) Peraturan pelaksanaan	KOMISI II

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
					dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	
17.	17 Tahun 2018	Kecamatan	Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	KOMISI II
18.	18 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara		BADAN ANGGARAN

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan		Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017		
19.	19 Tahun 2018	Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018		Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	BADAN ANGGARAN
20.	20 Tahun 2018	Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018		Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan	BADAN ANGGARAN

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural			pemerintahan di bidang keuangan.	
21.	21 Tahun 2018	Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan	Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	Baru		KOMISI XI
22.	22 Tahun 2018	Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional	Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Baru		KOMISI III
23.	23 Tahun 2018	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu		KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan			
24.	24 Tahun 2018	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Baru	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.	KOMISI VI
25.	25 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf		KOMISI VIII
26.	26 Tahun	Penambahan	Pasal 4 ayat (4)			KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
	2018	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara			
27.	27 Tahun 2018	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak			KOMISI VIII
28.	28 Tahun 2018	Kerja Sama Daerah	Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini	KOMISI II

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
29.	29 Tahun 2018	Pemberdayaan Industri	Pasal 76, Pasal 83, Pasal 84 ayat (9), Pasal 86 ayat (3), Pasal 90, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian		Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	KOMISI IV
30.	30 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berilaku Pada Lembaga Administrasi Negara	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak	Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berilaku Pada Lembaga Administrasi Negara		KOMISI XI
31.	31 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia		Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia		KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
32.	32 Tahun 2018	Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum	<p>1) Untuk menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat pelaksanaan pemilihan umum,</p> <p>2) berdasarkan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 182 huruf k, Pasal 227 huruf o dan huruf p, Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h, Pasal 258 ayat (2) huruf h, pasal 281, Pasal 302, dan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam kampanye Pemilu		KOMISI II
33.	33 Tahun 2018	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan	1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan	KOMISI II

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
				<p>Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Provinsi.</p>	<p>dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Provinsi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini</p>	

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
					2) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yoryakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan frerundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.	
34.	34 Tahun 2018	Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional	1) Pasal 64 Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2) Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 57 Undang-Undang	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian			
35.	35 Tahun 2018	Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia	Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	KOMISI VI
36.	36 Tahun 2018	Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual	1) Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2) Untuk menjalankan ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi			KOMISI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis			
37.	37 Tahun 2018	Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral	Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang		1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap kewajiban perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak pemegang IUPK Operasi Produksi yang	KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak		merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya yang belum diselesaikan sebelum IUPK Operasi Produksi diterbitkan, wajib dipenuhi sesuai dengan KK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat KK berlaku. 2) Ketentuan perlakuan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2019.	
38.	38 Tahun 2018	Perusahaan Umum (Perum) Damri	Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri		KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
39.	39 Tahun 2018	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan	Pasal 12, Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormata		KOMISI II
40.	40 Tahun 2018	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional	Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional		
41.	41 Tahun 2018	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata	Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata		KOMISI X
42.	42 Tahun	Jenis dan Tarif Atas	Pasal 4 ayat (3) dan	Mencabut dan		KOMISI IX

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
	2018	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan	Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
43.	43 Tahun 2018	Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi		KOMISI III
44.	44 Tahun 2018	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham	Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha			KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya	Milik Negara			
45.	45 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri	Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara			KOMISI XI
46.	46 Tahun 2018	Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero)Pt Angkasa Pura Idan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura liuntuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara	Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara			

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia				
47.	47 Tahun 2018	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014		
48.	48 Tahun 2018	Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing / Lembaga Asing	Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara			KOMISI XI
49.	49 Tahun 2018	Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara		Peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	KOMISI II

TABEL 3
PERATURAN PRESIDEN

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
1.	1 Tahun 2018	Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan usaha.	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI VI
2.	2 Tahun 2018	Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019	1) Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2) Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam	KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Industri Nasional Tahun 2015-2035		Peraturan Presiden ini;	
3.	3 Tahun 2018	Penjabat Sekretaris Daerah	Pasal 214 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Baru	Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yoryakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut	KOMISI II
4.	4 Tahun 2018	Badan Standardisasi Nasional	Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku: 1) Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran; 2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden sebagaimana tersebut disamping dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
				<p>Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan, sepanjang yang mengatur mengenai Badan Standardisasi Nasional; dan</p> <p>3) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir</p>		

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
				dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan, sepanjang yang mengatur mengenai unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional		
5.	5 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	Merupakan penyesuaian terhadap petunjuk teknis dana alokasi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.	KOMISI XI
6.	7 Tahun 2018	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 2) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sejak	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden	1) Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu	Belum ditetapkan sebagai mitra kerja komisi-komisi DPR

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			<p>kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>3) Bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila.</p>	Pembinaan Ideologi Pancasila	<p>diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>2) Bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat efektif menjalankan tugas dan fungsinya.</p>	RI
7.	9 Tahun 2018	Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Dan Pemberhentian	Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Baru		KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Komisioner Dan/Atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat				
8.	10 Tahun 2018	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI X
9.	11 Tahun 2018	Institut Agama Kristen Negeri Manado	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak	KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi		bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
10.	12 Tahun 2018	Institut Kristen Ambon Agama Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 	Mencabut dan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI X
11.	13 Tahun 2018	Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 	Baru	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Korporasi yang telah mendapatkan atau masih dalam proses pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, dan perizinan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan,	KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.		wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.	
12.	14 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataa		Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017		KOMISI X
13.	15 Tahun 2018	Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum	Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	Baru	Bukan merupakan amanat langsung dari Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah	KOMISI VII
14.	16 Tahun 2018	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan	KOMISI XI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			<p>Perbendaharaan Negara</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p>	<p>Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.</p>	
15.	17 Tahun 2018	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu	<p>1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan</p>	Baru	<p>Bahwa dalam keadaan tertentu dimana status keadaan darurat Bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko</p>	KOMISI VIII

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Bencana 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana		Bencana dan dampak yang lebih luas maka perlu untuk memberikan penugasan dan kewenangan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana	
16.	18 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan	Bukan merupakan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, tetapi berisi materi muatan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan	Mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Dokter Kepresidenan	Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter Kepresidenan dalam memberikan layanan pemeliharaan kesehatan bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suami, dan mantan Wakil Presiden dan istri/suami, dan Tamu Negara,	-
17.	19 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pusat Koordinasi Asean	Bukan merupakan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, tetapi berisi materi muatan	Baru	Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pusat Koordinasi	KOMISI VIII

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Untuk Bantuan Kemanusiaan Dalam Penanggulangan Bencana Mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Asean Co-Ordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management On Hosting And Granting Privileges And Immunities)	dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan dilakukan dengan Peraturan Presiden		ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana, pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan	
18.	20 Tahun 2018	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja	1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	KOMISI IX

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			2011 tentang Keimigrasian	Pendamping karena perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi.	Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. 2) Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.	
19.	21 Tahun 2018	Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019	Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Baru		KOMISI II
20.	22 Tahun 2018	Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Baru		KOMISI II
21.	23 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Bone	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan	KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
22.	24 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Curup	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI X
23.	25 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 92	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan	KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura	dari Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
24.	26 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Kediri	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI X
25.	27 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Kudus	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden	KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Islam Negeri Kudus sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
26.	28 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Madura	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI X
27.	29 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Parepare	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997	KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.	tenlang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
28.	30 Tahun 2018	Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	KOMISI X
29.	31 Tahun 2018	Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya	1) Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung	Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001	KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Penyang, Palangkaraya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram.	tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
30.	32 Tahun 2018	Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores				
31.	33 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019		Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019		KOMISI III
32.	34 Tahun 2018	Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Palestina Tentang	Bukan merupakan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi berisi materi muatan dalam menyelenggarakan	Baru	1) Untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan persaudaraan antara Republik Indonesia dan Negara Palestina, perlu memperkuat	KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu Yang Berasal Dari Wilayah Palestina (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Palestine On Trade Facilitation For Certain Products Originating From Palestinian Territories)	kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan dilakukan dengan Peraturan Presiden		kerja sama perdagangan kedua belah Pihak; 2) Bahwa Pemerintah Republik Indonesia mendukung peningkatan kehidupan sosial dan kemandirian ekonomi Palestina melalui penghapusan tarif bea masuk produk tertentu asal Palestina 3) Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina pada tanggal 12 Desember 2017 di	

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
					Buenos Aires, Argentina	
33.	35 Tahun 2018	Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar.		KOMISI V
34.	36 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi		Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai tindaklanjut pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta untuk	KOMISI VII

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
					mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	
35.	37 Tahun 2018	Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041	Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Baru		KOMISI V
36.	38 Tahun 2018	Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045		Baru	Dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan riset yang terintegrasi secara nasional.	KOMISI VII
37.	39 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus				KOMISI II

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden				
38.	40 Tahun 2018	Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	Nondelegasi	Baru		KOMISI XI
39.	41 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran (<i>Bilateral Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Iran</i>)				KOMISI I
40.	42 Tahun 2018	Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila			
41.	43 Tahun	Perubahan Atas		Mengubah beberapa	Dalam rangka	KOMISI VII

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
	2018	Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak		ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
42.	44 Tahun 2018	Indonesia National Single Window	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku: 1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: 1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan	KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
				Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka <i>Indonesia National Single Window</i> ; dan 2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengeelola Portal <i>Indonesia National Single Window</i>	Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka <i>Indonesia National Single Window</i> ; dan 2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengeelola Portal <i>Indonesia National Single Window</i> dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
43.	45 Tahun 2018	Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung				
44.	46 Tahun 2018	Pengesahan <i>Protocol Relating To An Amendment To The Convention On International Civil Aviation [Article 50 (a)]</i> (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil				KOMISI I

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Internasional [Pasal 50 (a)))]				
45.	47 Tahun 2018	Pengesahan <i>Protocol Relating To An Amendent To The Convention On International Civil Aviation [Article 56]</i> (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56])				KOMISI I
46.	48 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman		
47.	49 Tahun 2018	Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara				
48.	50 Tahun 2018	Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	Pasal 129 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan	KOMISI IV

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian	Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini	
49.	51 Tahun 2018	Pengesahan <i>Final Acts Of Universal Postal Union As The Result Of The 26th Istanbul Congress, Turkey 2016</i> (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke-26 Di Istanbul, Turki 2016)	Non Delegasi			
50.	52 Tahun 2018	Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Non Delegasi			
51.	53 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan	Non Delegasi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan	

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Lembaga Ketahanan Nasional		Presiden Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di kmbaga Ketahanan Nasional	perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di kmbaga Ketahanan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini	
52.	54 Tahun 2018	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Non Delegasi	Mencabut dan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014		KOMISI III
53.	55 Tahun 2018	Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 – 2029	Non Delegasi			

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
54.	56 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Non Delegasi	Mengubah lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional		
55.	59 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Non Delegasi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
56.	60 Tahun 2018	Pengesahan Final Acts Of The World Radiocommunication Conference, Geneva 2015 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015)				
57.	61 Tahun 2018	Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik	Non Delegasi			

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Indonesia, Dan Kepala Staf Angkatan				
58.	62 Tahun 2018	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Non Delegasi	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional		
59.	63 Tahun 2018	Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan			
60.	64 Tahun 2018	Renovasi Dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Jakarta,	Non Delegasi			

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Pembangunan Prasarana Olahraga Dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih Di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Dan Universitas Papua Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi Di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dan Pasar Prawirotaman Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				
61.	65 Tahun 2018	Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi	Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang	Baru		KOMISI X

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Kebudayaan	Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan			
62.	66 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pembahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.	

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
63.	67 Tahun 2018	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	Pasal 165 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan yang mengatur mengenai unit organisasi atau pelaksanaan tugas membantu DKPP dalam menangani administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat panitia pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Presiden ini	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat panitia pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Presiden ini	KOMISI II
64.	68 Tahun 2018	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,	Pasal 152 Undang-Undang Nomor 7	Mencabut dan menyatakan tidak	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,	KOMISI II

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	berlaku selain ketentuan yang mengatur mengenai unit organisasi atau pelaksanaan tugas membantu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menangani administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan	semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat panitia pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Presiden ini	
65.	69 Tahun	Perubahan Atas		Mengubah beberapa		KOMISI VI

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
	2018	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian		ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian		
66.	70 Tahun 2018	Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang susunan, Kedudukan, Tata Kerja Badan standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaa			KOMISI X
67.	71 Tahun 2018	Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi	Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis pakaian sipil		
68.	72 Tahun 2018	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
69.	74 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat (<i>Air Services Agrrement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States</i>)				
70.	75 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak Atas Penghasilan <i>(Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of</i>				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		<i>Serbia for the Avoidance of Double Taxation with the Respect to Taxes on Income)</i>				
71.	76 Tahun 2018	Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan <i>(Basic Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements)</i>				
72.	77 Tahun 2018	Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup			
73.	78 Tahun 2018	Persyaratan Dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan	Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012			

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, Dan Keluarga Pahlawan Nasional	tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			
74.	79 Tahun 2018	Lembaga Administrasi Negara	Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara		KOMISI II
75.	80 Tahun 2018	Jenis Dan Besaran Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah	Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah			
76.	81 Tahun 2018	Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara	Non Delegasi			
77.	82 Tahun 2018	Jaminan Kesehatan	1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang		KOMISI IX

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan		
78.	83 Tahun 2018	Penanganan Sampah Laut				
79.	84 Tahun 2018	Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan				
80.	85 Tahun 2018	Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Pasal 305 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon		KOMISI II

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
				Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		
81.	86 Tahun 2018	Reforma Agraria				
82.	87 Tahun 2018	Tunjang Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara				
83.	88 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia				
84.	89 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
85.	90 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika				
86.	91 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional				
87.	92 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
88.	93 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan				
89.	94 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral				
90.	95 Tahun 2018	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
91.	96 Tahun 2018	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Pasal 23, Pasal 25 ayat (4)', Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2)II, Pasal 74, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung Peraturan Presiden ini diundangkan.	

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
			<p>Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>			
92.	97 Tahun 2018	<p>Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-</p>				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)				
93.	98 Tahun 2018	Jembatan Surabaya – Madura				
94.	99 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik				
95.	100 Tahun 2018	Pembangunan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama				
96.	101 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan				
97.	102 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia				
98.	103 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia				
99.	104 Tahun	Tunjangan Kinerja				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
	2018	Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan				
100.	105 Tahun 2018	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota				
101.	106 Tahun 2018	Pengesahan Protocol 2 On Fifth Freedom Traffic Rights Between Contracting Parties (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Antara Para Pihak)				
102.	107 Tahun 2018	Pengesahan Protocol To Implement The Eighth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)				
103.	108 Tahun 2018	Pengesahan First Protocol To Amend The Agreement Establishing The Asean-Australia-New-Zealand Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru)				
104.	109 Tahun 2018	Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)				
105.	110 Tahun 2018	Pengesahan Asean Agreement On Medical Device Directive (Persetujuan Asean Untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan)				
106.	111 Tahun 2018	Pengesahan Third Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		The Association Of South East Asian Nations And The Republic Of Korea (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)				
107.	112 Tahun 2018	Pengesahan Protocol To Amend The Framework On Comprehensive Economic Co-Operation And Certain Agreements Thereunder Between The Association Of Southeast Asian Nations (Asean) And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok)				
108.	113 Tahun 2018	Pengesahan Protocol To Implement The Ninth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)				
109.	114 Tahun 2018	Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Protocol To Amend The Preferential Trade				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan)				
110.	115 Tahun 2018	Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asian Forest Cooperation Organization (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia)				
111.	116 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi				
112.	117 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara				
113.	118 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik				

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
		Indonesia				
114.	119 2018	Tahun Tunjangan Pegawai Lingkungan Kementerian Perhubungan	Kinerja Di			
115.	120 2018	Tahun Tunjangan Pegawai Lingkungan Kementerian Perindustrian	Kinerja Di			
116.	121 2018	Tahun Tunjangan Pegawai Lingkungan Kementerian Pertanian	Kinerja Di			
117.	122 2018	Tahun Tunjangan Pegawai Lingkungan Kementerian Perdagangan	Kinerja Di			
118.	123 2018	Tahun Tunjangan Pegawai Lingkungan Kementerian Negeri	Kinerja Di Dalam			
119.	124 2018	Tahun Tunjangan Pegawai Lingkungan Kementerian Negeri	Kinerja Di Luar			

NO.	NOMOR	TENTANG	AMANAT	STATUS	KETERANGAN	BIDANG
120.	125 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat				
121.	126 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata				
122.	127 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan				
123.	129 Tahun 2018	Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019				
124.	130 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama				
125.	131 Tahun 2018	Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi				

Sumber: *setneg.go.id, sipuu.setkab.go.id dan Pusat Data HukumOnline, diolah, Desember 2018.*